

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
17.11
PELAKSANA KEGIATAN 2017

1. KEGIATAN : PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

2. RUJUKAN, YANG MELIPUTI:

1. KAK Perencanaan Nomor :..... 2017
2. RPJM : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
3. Rentra SKPD : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Undang –Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- h. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

b. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada pengguna laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelola keuangan Daerah juga untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik(good governance).

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a) Sumber Pendanaan
- b) Sumber Daya Manusia
- c) R/C BANK JATIM
- d) Nota Debet
- e) Nota Kredit
- f) Bilyet Saldo

4. Keluaran Kegiatan/Ouput

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5. Strategi Pencapaian Keluaran

Methodode pelaksanaan.

- Praktek.

Jadwal Tahapan Pelaksanaan

| No | Uraian Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Uang lembur PNS dan Non PNS | | | | | | | x | x | | | | |
| 2. | Belanja Bahan Pakai Habis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Jasa servis pelayanan Kantor dan rumah tangga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Jasa servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Cetak dan Penggandaan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. | Belanja sarana mobilitas darat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

6. Waktu Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

7. Spesifikasi Teknis

- -

8. Biaya yang diperlukan Rp. 90.732.000,-

- | | | |
|--|---|--------------|
| a) Honor lembur PNS | : | 44.832.000,- |
| b) Belanja Bahan Pakai Habis | : | 900.000,- |
| c) Jasa servis pelayanan Kantor dan rumah tangga | : | 1.000.000,- |
| d) Belanja Penggandaan | : | 39.000.000,- |
| e) Sewa sarana mobilitas darat | : | 5.500.000,- |

9. Penerima Manfaat Semua Dinas/Badan/Kantor dan lembaga baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.

10. Monitoring Dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bulan januari sampai bulan Desember.

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MUCH. TAUFAN, S.Sos
NIP. 195905041986031020

ANIE SUSANTI H, SE, Ak
NIP. 197703132001122001

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003